

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran desa dalam jumlah yang sangat besar melalui kebijakan Dana Desa yang mencapai lebih dari Rp60 triliun per tahun. Secara kumulatif, sejak tahun 2015 hingga 2024, total Dana Desa yang telah disalurkan mencapai lebih dari Rp400 triliun (Kementerian Keuangan, 2024; Kompas, 2024). Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk intervensi fiskal terbesar yang secara langsung menyasar unit pemerintahan terkecil, yaitu desa, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

Namun demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan desa secara proporsional. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti inefisiensi penggunaan anggaran, keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, serta potensi penyimpangan dalam pengelolaannya (Kompas, 2024; ICW, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas fiskal belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas penggunaan anggaran (World Bank, 2023; Mathias Cormann & Secretary General, 2021). Peningkatan alokasi anggaran desa dalam jumlah besar tanpa diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaannya berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya publik (*waste of public resources*) (Musgrave, 1959). Dalam konteks keuangan negara, setiap rupiah yang dialokasikan seharusnya mampu menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Apabila anggaran yang besar

tidak mampu menghasilkan peningkatan kualitas pembangunan yang signifikan, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi inefisiensi fiskal yang perlu dianalisis secara lebih mendalam.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berorientasi pada input (*input-oriented policy*) dengan hasil pembangunan yang diharapkan (*output-oriented development*). Kebijakan Dana Desa pada dasarnya dirancang untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan (*policy goals*) dengan hasil yang dicapai di lapangan (*policy outcomes*). Kesenjangan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasi serta kondisi struktural wilayah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam ekonomi pembangunan, yaitu apakah peningkatan anggaran desa sebagai stimulus fiskal secara otomatis mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa, atau justru terdapat permasalahan dalam efektivitas penggunaannya. Apabila kondisi ini tidak dianalisis secara empiris, maka kebijakan transfer fiskal berpotensi tidak memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menguji secara kuantitatif efektivitas penggunaan anggaran desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berperan strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sekitar 40 persen penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa

akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks pembangunan modern, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang aktif dan mandiri. Transformasi ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara mandiri. Kebijakan ini mencerminkan implementasi desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Dalam perspektif ekonomi makro, peningkatan kapasitas fiskal desa dapat dijelaskan melalui Teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui mekanisme stimulus fiskal (Keynes, 1936). Dalam kerangka ini, anggaran desa berfungsi sebagai stimulus fiskal pada level mikro yang diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah perspektif Keynesian, di mana anggaran desa diposisikan sebagai stimulus fiskal yang berfungsi sebagai input dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan desa (Yasmin & Sari, 2025; Oates (2005). Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal desa dipandang sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kualitas pembangunan desa yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Sementara itu, konsep public goods dalam teori keuangan publik tetap digunakan sebagai pendekatan pelengkap untuk menjelaskan fungsi alokasi

anggaran desa, khususnya dalam penyediaan layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini secara teoretis berpijak pada pendekatan Keynesian sebagai kerangka utama, dengan mengadopsi elemen teori keuangan publik sebagai pendukung.

Namun demikian, efektivitas stimulus fiskal sangat dipengaruhi oleh nilai *fiscal multiplier*, yaitu kemampuan pengeluaran pemerintah dalam menciptakan efek berganda dalam perekonomian. Apabila multiplier effect rendah, maka peningkatan anggaran tidak akan menghasilkan peningkatan output yang signifikan (Mankiw, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh produktivitas penggunaan anggaran tersebut.

Dalam perspektif ekonomi publik, penggunaan anggaran pemerintah harus memenuhi prinsip efisiensi alokatif dan efisiensi teknis Musgrave (1959); (Hyman, 2020). Selain itu, dalam jangka panjang dapat terjadi fenomena *diminishing marginal return*, yaitu kondisi di mana tambahan anggaran menghasilkan tambahan output yang semakin kecil (Kusumawardani & Fauzi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tanpa peningkatan kualitas pengelolaan tidak akan menghasilkan pembangunan yang optimal.

Selain itu, anggaran desa juga berkaitan dengan penyediaan *public goods*, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, efektivitas anggaran desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya secara efisien dan tepat sasaran.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pendekatan deskriptif atau indikator ekonomi makro, sehingga belum mampu menangkap

kualitas pembangunan desa secara multidimensional (Farhan & Fardana, 2024; (Iftitah & Wibowo, 2022; (Akbar et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan robust (Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, 2009; Wooldridge, 2012).

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa, penelitian ini menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indikator utama. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (Menteri Desa, 2016; *Komponen Indeks Desa Membangun Tahun 2024*, n.d.).

Penting untuk ditegaskan bahwa IDM tidak mengandung variabel keuangan atau nilai rupiah. Seluruh indikator IDM bersifat non-moneter, sehingga IDM merupakan *output murni (zero budget variable)* yang independen dari variabel anggaran (*Komponen Indeks Desa Membangun Tahun 2024*, n.d.). Dengan demikian, IDM dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk menilai produktivitas anggaran desa.

Meskipun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak secara langsung mengukur produktivitas ekonomi dalam bentuk output atau pendapatan per kapita, beberapa indikator yang terdapat dalam dimensi Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) mencerminkan hasil dari aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa. Dimensi tersebut mencakup antara lain keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat, akses terhadap pasar, keberadaan lembaga ekonomi desa, keterjangkauan pusat perdagangan, akses transportasi, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Dengan demikian, peningkatan nilai IDM dapat mencerminkan meningkatnya kemampuan desa dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih

produktif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, produktivitas anggaran diartikan sebagai kemampuan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Modal dalam menghasilkan peningkatan kualitas pembangunan desa yang tercermin melalui indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam IDM. Oleh karena itu, meskipun IDM bukan indikator keuangan, perubahan nilai IDM dapat digunakan sebagai proksi untuk menilai efektivitas dan produktivitas penggunaan anggaran desa dalam menghasilkan outcome pembangunan.

Dengan demikian, hubungan antara anggaran desa dan IDM bersifat kausal satu arah, yaitu anggaran desa sebagai stimulus fiskal memengaruhi kualitas pembangunan desa yang tercermin dalam IDM. Tidak terdapat hubungan timbal balik (*reverse causality*), sehingga model penelitian ini memiliki dasar kausalitas yang kuat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara peningkatan anggaran desa sebagai stimulus fiskal dengan hasil pembangunan yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengindikasikan adanya gap produktivitas anggaran dan potensi inefisiensi dalam penggunaan anggaran desa.

Fenomena tersebut dapat diamati pada Kabupaten Gresik yang memiliki karakteristik wilayah yang heterogen. Perbandingan capaian pembangunan desa dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa skor IDM Kabupaten Gresik

relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional, namun laju pertumbuhannya cenderung melambat.

Tabel 1. 1 Perbandingan Skor IDM Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020–2024

Tahun	Gresik	Jawa Timur	Nasional
2020	0,7325	0,7026	0,6633
2021	0,7706	0,7361	0,6941
2022	0,8054	0,7621	0,7135
2023	0,8386	0,7822	0,7352
2024	0,8567	0,8014	0,7504

Sumber DPMD Gresik, Olahan Peneliti 2026

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024 secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa desa-desa di Kabupaten Gresik telah memiliki tingkat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relatif baik sebagaimana diukur melalui indikator resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, 2023).

Namun, apabila dicermati dari sisi tren kenaikannya, skor IDM menunjukkan pola yang semakin melandai dari tahun ke tahun. Kenaikan pada periode awal lebih besar dibandingkan periode berikutnya. Dalam literatur ekonomi publik, pola seperti ini sering dijelaskan sebagai gejala *diminishing marginal return*, yaitu ketika tambahan intervensi kebijakan tidak lagi menghasilkan tambahan output yang sebanding (Stiglitz, 2000).

Dalam perspektif teori *stimulus fiskal* dari John Maynard Keynes (1936),

peningkatan pengeluaran pemerintah seharusnya mendorong peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme *multiplier effect*. Apabila konsep ini bekerja optimal pada level desa, maka peningkatan kapasitas fiskal desa seharusnya tercermin dalam percepatan kenaikan IDM, bukan perlambatan.

Dengan demikian, posisi Kabupaten Gresik yang berada di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional dalam capaian IDM tidak serta-merta menunjukkan bahwa proses pembangunan desa telah berjalan secara optimal. Justru dari sudut pandang evaluasi kebijakan publik, kondisi ini membuka ruang pertanyaan yang lebih mendalam: apakah tingginya capaian status desa tersebut benar-benar merupakan hasil dari efektivitas pengelolaan anggaran desa, ataukah hanya merupakan kelanjutan dari kondisi dasar desa yang memang telah relatif maju sejak awal. Pertanyaan ini menjadi krusial karena IDM, sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sepenuhnya dibangun dari indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak mengandung unsur nilai rupiah, sehingga sangat tepat dijadikan alat ukur objektif untuk menilai produktivitas anggaran desa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren IDM pada tabel ini perlu dibaca secara berdampingan dengan besarnya kapasitas fiskal desa yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut, agar terlihat hubungan antara besarnya stimulus fiskal desa dengan kualitas output pembangunan yang dihasilkan.

Tabel 1. 2 Realisasi Total Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	PADes	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)	Belanja Modal (BM)	Total Anggaran
2020	40.709.06	116.723.230	311.729.893	256.597.139	725.759.329
	5.285	.226	.586	.931	.032
2021	35.365.37	139.228.776	259.902.293	320.753.831	755.250.279
	8.568	.667	.461	.195	.895
2022	48.275.15	149.213.392	293.212.432	446.192.045	936.893.021
	0.648	.586	.732	.897	.865
2023	44.023.00	171.170.203	318.206.466	342.193.800	875.593.473
	2.213	.644	.907	.272	.037
2024	42.221.67	170.525.043	320.876.736	373.654.725	907.278.183
	8.063	.031	.629	.358	.079

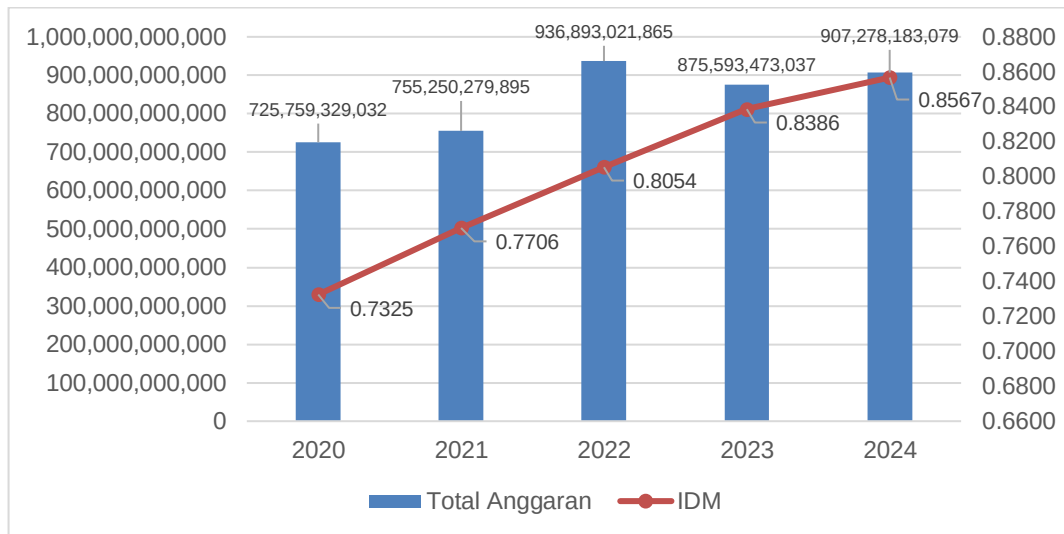
Sumber DPMD Gresik, Olahan Peneliti 2026

Pada Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa total kapasitas fiskal 330 desa di Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode penelitian. Akumulasi PADes, Dana Desa, ADD, serta Belanja Modal menunjukkan bahwa desa kini mengelola sumber daya keuangan publik dalam skala miliaran rupiah setiap tahunnya.

Dalam teori *public goods*, peningkatan belanja publik dalam jumlah besar seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (Stiglitz, 2000). Sejalan dengan itu, dalam kerangka Keynesian, kondisi ini merupakan bentuk nyata *stimulus fiskal* yang diharapkan menghasilkan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2021).

Namun ketika data pada Tabel 1.2 dikaitkan kembali dengan tren IDM pada Tabel 1.1, terlihat bahwa peningkatan anggaran yang sangat tajam tidak diikuti oleh kenaikan IDM yang proporsional. Berbagai penelitian pembangunan daerah, termasuk laporan dari World Bank (2023), menegaskan bahwa peningkatan transfer fiskal ke pemerintah lokal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembangunan apabila tidak dibarengi efisiensi pengelolaan dan kesesuaian dengan kondisi spasial wilayah.

Besarnya realisasi anggaran desa yang tergambar pada tabel ini memperlihatkan bahwa desa di Kabupaten Gresik telah menjadi entitas pemerintahan dengan kapasitas fiskal yang sangat kuat. Dalam perspektif teori *stimulus fiskal* dari John Maynard Keynes, kondisi ini seharusnya menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui mekanisme *multiplier effect*. Namun, ketika data ini dihubungkan kembali dengan tren IDM pada Tabel 1.1, muncul kebutuhan untuk menelaah lebih jauh apakah besarnya kapasitas fiskal tersebut benar-benar mampu dikonversi menjadi peningkatan kualitas pembangunan desa yang terukur. Dengan kata lain, tabel ini tidak hanya menyajikan angka realisasi anggaran, tetapi menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran desa dalam menghasilkan output pembangunan. Hubungan antara besarnya anggaran dan capaian IDM tersebut akan terlihat lebih jelas ketika divisualisasikan dalam bentuk grafik perbandingan tren pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 Perbandingan Tren Realisasi Anggaran Desa dan Skor IDM Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

Sumber: DPMD Gresik, diolah peneliti, 2025.

Gambar 1.1 memperlihatkan perbedaan yang kontras antara tren kenaikan anggaran desa dan tren kenaikan IDM. Grafik batang menunjukkan lonjakan signifikan pada komponen anggaran desa, sedangkan garis IDM hanya menunjukkan kenaikan yang relatif landai.

Perbedaan kemiringan tren ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara input fiskal dan output pembangunan. Dalam kerangka teori John Maynard Keynes, kondisi ini menunjukkan bahwa *fiscal multiplier* pada level desa belum bekerja secara optimal (Mankiw, 2021).

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik spasial Kabupaten Gresik. Di wilayah kepulauan seperti Bawean, terjadi *local inflation* pada sektor konstruksi akibat hambatan logistik laut yang menyebabkan harga material menjadi *sticky* pada tingkat tinggi. Akibatnya, setiap rupiah stimulus fiskal memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan wilayah daratan.

Sementara itu, di wilayah industri seperti Manyar, tingginya PADes tidak secara langsung meningkatkan IDM secara akseleratif karena terganggunya

Indeks Ketahanan Ekologi (IKE) sebagai salah satu pilar utama IDM. Eksternalitas lingkungan menyebabkan anggaran desa lebih banyak terserap untuk pemulihan (*recovery spending*) dibandingkan pembangunan baru (Kemendesa, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala efektivitas anggaran yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekologis, sehingga memengaruhi kemampuan anggaran desa untuk dikonversi menjadi output pembangunan yang tercermin dalam IDM.

Perbandingan visual antara tren anggaran desa dan tren IDM pada grafik ini memperjelas bahwa peningkatan kapasitas fiskal desa tidak secara otomatis diikuti oleh percepatan peningkatan kualitas pembangunan desa. Dalam konteks ini, grafik tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi data, tetapi menjadi bukti awal yang memperlihatkan adanya kendala efektivitas stimulus fiskal di tingkat desa. Kondisi geografis kepulauan di Bawean yang memicu *local inflation* pada harga material, serta tekanan eksternalitas lingkungan di kawasan industri Manyar yang memengaruhi Indeks Ketahanan Ekologi (IKE), menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang memengaruhi daya guna anggaran desa. Oleh sebab itu, fenomena yang tergambar pada grafik ini menuntut pembuktian empiris melalui analisis kuantitatif yang lebih mendalam mengenai pengaruh PADes, Dana Desa, ADD, dan Belanja Modal terhadap IDM, yang selanjutnya akan diuji menggunakan pendekatan regresi data panel pada Bab III.

Fenomena gap produktivitas tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *budget constraint* yang dipengaruhi oleh kondisi struktural wilayah. Pada wilayah kepulauan seperti Bawean, kendala geografis menyebabkan terjadinya *local inflation* pada sektor konstruksi. Ketergantungan terhadap distribusi logistik laut menciptakan hambatan pasokan yang menyebabkan harga material

pembangunan menjadi tinggi dan bersifat kaku (*sticky price*) (Mankiw, 2012).

Akibatnya, setiap rupiah anggaran desa di wilayah Bawean memiliki daya beli yang lebih rendah dibandingkan wilayah daratan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya efektivitas stimulus fiskal, di mana peningkatan anggaran tidak menghasilkan output pembangunan yang sebanding.

Sementara itu, pada wilayah industri seperti Kecamatan Manyar dan sekitarnya, permasalahan yang dihadapi berbeda. Tingginya aktivitas industri menyebabkan munculnya eksternalitas negatif berupa pencemaran lingkungan dan degradasi ekologi. Dalam konteks IDM, kondisi ini secara langsung memengaruhi Indeks Ketahanan Ekologi (IKE) yang merupakan salah satu dimensi utama penyusun IDM.

Akibatnya, meskipun PADes di wilayah tersebut relatif tinggi, peningkatan status desa tidak terjadi secara signifikan karena sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan pemulihan lingkungan (*recovery spending*), bukan untuk pembangunan baru. Fenomena ini menunjukkan adanya *negative externality* yang mengurangi efektivitas stimulus fiskal (Hyman, 2020; Musgrave, 1959).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran desa dan pembangunan tidak bersifat linear, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti kondisi geografis, struktur ekonomi, dan eksternalitas lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran desa tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan efisiensi dan kualitas penggunaan anggaran.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan aspek fiskal dengan kondisi spasial wilayah, khususnya perbedaan antara wilayah kepulauan dan kawasan industri di Kabupaten Gresik.

Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam memahami efektivitas stimulus fiskal desa yang selama ini cenderung dianalisis secara agregat. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagian besar penelitian tersebut masih menggunakan indikator makro atau indikator tunggal yang belum mampu menggambarkan pembangunan desa secara multidimensional. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung belum mengintegrasikan kondisi spasial wilayah sebagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran desa.

Padahal, dalam konteks empiris seperti di Kabupaten Gresik, perbedaan karakteristik wilayah seperti daerah kepulauan dan kawasan industri terbukti memengaruhi kemampuan anggaran desa dalam menghasilkan output pembangunan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (research gap) yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana keuangan desa sebagai stimulus fiskal dapat dikonversikan menjadi kualitas pembangunan desa yang diukur secara komprehensif menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), dengan mempertimbangkan konteks spasial wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Belanja Modal terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik periode 2020–2024.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik tahun 2020–2024?
2. Apakah realisasi Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik tahun 2020–2024?

3. Apakah realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik tahun 2020–2024?
4. Apakah realisasi Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik tahun 2020–2024?
- 5.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh realisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh realisasi Dana Desa (DD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh realisasi Belanja Modal terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Gresik selama periode 2020–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya penelitian tentang desentralisasi fiskal dan keuangan publik di tingkat mikro (desa). Dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai ukuran kesejahteraan, penelitian ini memperluas ruang analisis teori Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Publik yang umumnya hanya diuji pada level kabupaten atau provinsi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan

model empiris baru tentang efektivitas keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menjadi referensi akademik untuk penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif berbasis data panel.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi efektivitas kebijakan fiskal desa, terutama dalam mengukur sejauh mana peningkatan PADes, DD, ADD, dan Belanja Modal berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam penyusunan strategi penguatan keuangan desa yang lebih berbasis hasil (*result-based governance*).
- b. Bagi Pemerintah Desa, Penelitian ini memberikan wawasan empiris tentang pentingnya tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan proporsi belanja produktif serta pengembangan PADes berbasis potensi lokal.
- c. Bagi Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kemendesa PDTT), Temuan penelitian dapat dijadikan masukan dalam merumuskan kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berbasis kinerja, sehingga distribusi anggaran lebih adil dan efektif dalam mendorong capaian Indeks Desa Membangun.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti, Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris yang kuat dalam penelitian kebijakan publik, ekonomi pembangunan,

serta keuangan daerah berbasis data kuantitatif.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan di bidang efisiensi fiskal desa dan kesejahteraan sosial.

1.4.3 Manfaat Sosial dan Masyarakat

Selain kontribusi akademik dan kebijakan, penelitian ini juga memiliki nilai sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa.

Masyarakat desa dapat memahami bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besarnya dana, tetapi juga pada cara dana tersebut dikelola dan digunakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini turut mendukung terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, transparan, dan berdaya secara ekonomi